

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN SAHAM PUBLIK TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

GOOD CORPORATE GOVERNANCE AND PUBLIC OWNERSHIP EFFECT ON CSR DISCLOSURE

Oleh: Reza Manjalang Muda Siregar
Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
Rezamanjalangmudas@yahoo.com
Denies Priantinah
Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris, Komposisi Kepemilikan Saham Institusional, Komposisi Kepemilikan Saham Asing, Komposisi dan Kepemilikan Saham Publik terhadap Tingkat Pengungkapan CSR. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang digunakan sebanyak 76 perusahaan dari total populasi sebanyak 82 perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 dan 2014. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi linear sederhana dan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Ukuran Komite Audit dan Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Variabel Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen dan Komposisi Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil uji serempak menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Kata kunci: *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance* (Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing), Komposisi Kepemilikan Publik, *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Abstract

This study aims to determine Correlation between Audit Comitee, Board of Independence, Institutional Ownership, Foreign Ownership and Public Ownership to CSR disclosure. This study uses secondary data and purposive sampling method. Processing and analysis of data in this study use simple and multiple linear regression. The sample in this study is 76 companies from total population of 82 mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013 and 2014. The results of this study indicate that the variable size of the audit committee and composition of foreign ownership has significant positive effect on the level of disclosure of corporate social responsibility. Composition of Public Ownership variable shows the negative and significant result. On the other hand, Composition of Independence Board and Composition of Institutional Ownership did not significantly affect the level of Corporate Social Responsibility disclosure. Multiple linear regression test shows the positive and significant result towards the level of Corporate Social Responsibility disclosure.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance (the size of the audit committee, the composition of the independent board, Composition of Institutional Ownership, Composition of Foreign Ownership), Composition of Public Ownership, Global Reporting Initiative (GRI).

PENDAHULUAN

Upaya untuk meningkatkan penerapan aktivitas *Corporate Social Responsibility*

(CSR) di Indonesia salah satunya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan UU No. 40 tahun 2007 tentang perseroan

terbatas pada pasal 74. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kegiatan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kegiatan yang diwajibkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kepatutan dan kewajaran sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada kenyataannya tingkat pengungkapan CSR di Indonesia masih relatif rendah, hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahaya dkk. (2008) yang menunjukkan bahwa dari 100 sampel perusahaan di Indonesia rata-rata tingkat pengungkapan tanggung jawab sosialnya berada di angka 14,15%.

CSR diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha perusahaan agar bertahan dalam jangka panjang dan perusahaan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat serta lingkungan sekitar. Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dengan tujuan agar keberlangsungan hidup perusahaan tetap terjaga dan juga keuntungan perusahaan dalam jangka panjang harus selaras dengan keadilan sosial dan perlindungan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Pernyataan ini berdasarkan pedoman *Global Reporting Inisiatives (GRI)* (2013) yang menyatakan bahwa semakin banyak perusahaan dan organisasi lain yang ingin membuat operasional mereka berkelanjutan.

Sinaga (2011) menyatakan bahwa tekanan dari berbagai pihak memaksa

perusahaan untuk menerima tanggung jawab atas dampak aktivitas bisnisnya, oleh karena itu CSR memainkan peran penting sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan masyarakat (Habbash, 2015). Said, Zainuddin dan Haron (2009) menyatakan bahwa CSR mampu meningkatkan kinerja keuangan, meningkatkan citra perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Pada era informasi dan teknologi serta desakan globalisasi, tuntutan menjalankan CSR semakin besar. Oleh karena itu, di dalam praktik, penerapan CSR selalu disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Namun pada kenyataannya CSR masih dianggap sepele dan dilakukan hanya untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat sekitar.

Pengungkapan CSR banyak dipengaruhi banyak faktor salah satunya *Good Corporate Governance (GCG)*. Konsep GCG mulai dikenal di Indonesia sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Pada saat itulah GCG mencuat sebagai bentuk kontribusi pemerintah dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Prabudi dan Suana (2015) pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan (*Letter*

of Intent) dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang mendorong terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan GCG.

Pemerintah Indonesia mendirikan lembaga khusus, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) dan di revisi menjadi Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang memiliki tugas pokok dalam merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan memantau perbaikan di bidang *corporate governance* di Indonesia. Kerangka kerja tata kelola perusahaan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006). Seiring berjalannya waktu GCG telah berperan dalam tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan perusahaan, seperti yang diungkapkan Habbash (2015) mengungkapkan bahwa GCG telah berevolusi sebagai sarana yang mengakomodasi hal yang dulunya tidak dianggap perlu yaitu hubungan bisnis-lingkungan dan hubungan bisnis-masyarakat.

Habbash (2015) meneliti pengaruh komite audit, dewan independen, CEO *duality*, kepemilikan pemerintah, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi terhadap CSR dengan sampel 267

perusahaan *go public* dan *non financial* pada tahun 2007-2011 di negara Saudi Arabia. Hasil penelitian Habsah (2015) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah dan kepemilikan keluarga berpengaruh positif, sedangkan variabel komite audit, komisaris independen, *role duality* dan kepemilikan institusi tidak berpengaruh. Penelitian ini serupa dengan penelitian Habbash (2015) dengan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 dan 2014. Penulis mengambil sampel perusahaan pertambangan karena dari berbagai macam sektor perusahaan, perusahaan pertambangan adalah yang dirasa oleh penulis paling cocok untuk diteliti pengungkapan tanggung jawab sosialnya. Pada perusahaan pertambangan, kegiatan produksinya banyak menimbulkan dampak negatif untuk lingkungan sekitar, seperti pembukan lahan, pembuangan limbah seperti arsenik dan merkuri ke sungai, pengerukan sungai dan penggunaan bahan peledak. Karena alasan tersebut, maka penulis meyakini bahwa sudah seharusnya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya bagi lingkungan sekitar.

Penulis menambahkan variabel independen kepemilikan asing dan kepemilikan publik dalam penelitian ini, karena dalam penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2008) menemukan hasil bahwa kepemilikan saham asing berpengaruh

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Hasil penelitian yang dilakukan Hadi dan Sabeni (2002) juga menunjukkan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap pelaporan CSR tahunan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian Rahayu dan Anisyukurlillah (2015) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Perusahaan yang sahamnya dikuasai publik lebih banyak menunjukkan bahwa para investor dari ranah publik telah memberikan banyak kepercayaan kepada perusahaan sehingga untuk menjaga kepercayaan tersebut, perusahaan akan semaksimal mungkin mengungkapkan segala kegiatan yang ada di perusahaannya. Salah satu pengungkapan tersebut adalah kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kausal komparatif yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab-akibat. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian *ex post facto*, yaitu tipe penelitian terhadap data yang dikumpulkan setelah terjadinya suatu fakta atau peristiwa.

Waktu dan Tempat Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013 dan 2014. Data tersebut diakses dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL) yaitu www.icamel.id. Waktu pengambilan data dilakukan pada bulan Februari 2016 dan penelitian dilakukan pada bulan Mei 2016 hingga Oktober 2016.

Subjek Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2014. Perusahaan yang terdaftar berjumlah 82 perusahaan. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan metode *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel sebagai berikut: (1) Perusahaan sektor tambang terdaftar di BEI di tahun 2013 dan 2014 (2) Mengungkapkan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian, yaitu CSR, komite audit, dewan komisaris independen, dan kepemilikan saham. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan pertimbangan atau kriteria diatas, diperoleh sampel sebanyak 76 perusahaan.

Prosedur

Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis dokumen-dokumen laporan tahunan yang telah diterbitkan emiten yang bersangkutan di website resmi Bursa Efek Indonesia *www.idx.co.id* dan *www.icamel.id*.

Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2009). Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran data. Data yang memiliki standar deviasi yang semakin besar menggambarkan data tersebut semakin menyebar. Standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum menggambarkan persebaran variabel yang bersifat metrik.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data memenuhi asumsi klasik. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya estimasi yang bias, mengingat tidak pada semua data regresi dapat diterapkan. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji Normalitas, uji Multikolinearitas, uji Heteroskedastisitas, dan uji Autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2009). Alat uji yang digunakan pada penelitian ini adalah uji statistik dengan Kolmogorov-Smirnov Z (1-Sample K-S).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2009). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas, dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu kondisi apabila variabel pengganggu mempunyai varian yang berbeda dari satu amatan ke amatan yang lain atau varian antara variabel dalam model tidak konstan. Asumsi varian dikatakan konstan apabila distribusi residual tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $(t-1)$. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, pada penelitian ini digunakan uji *Durbin-Watson* (D-W test). Uji Durbin Watson banyak digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intersep dalam model regresi dan tidak ada autokorelasi lagi diantara variabel bebas, yang ditunjukkan dengan nilai D-W ada diantara nilai dua dan 4-du.

Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis Regresi Linear Sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel Independen (X) dengan variabel Dependen (Y) menggunakan persamaan

regresi linear sederhana dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y : Variabel Dependen

a : Konstanta

X : Variabel Independen

b : Koefisien regresi b

Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linier berganda dilakukan terhadap model yang diajukan penulis untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hubungan antara karakteristik GCG dan Kepemilikan Publik dengan pengungkapan CSR perusahaan diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$CSRDi = \beta_0 + \beta_1 KA + \beta_2 KDKI + \beta_3 KKI + \beta_4 KKA + \beta_5 KKP + E$$

Keterangan:

CSRDi = Indeks pengungkapan CSR perusahaan i

KA = Ukuran Komite Audit

KDKI = Komposisi Dewan Komisaris Independen

KKI = Komposisi Kepemilikan Institusi

KKA = Komposisi

Kepeemilikan Asing

KKP = Komposisi Kepeemilikan Publik

E = *error term*

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas untuk variabel penelitian disajikan sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05363647
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.047
	Negative	-.043
Kolmogorov-Smirnov Z		.409
Asymp. Sig. (2-tailed)		.996

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil uji normalitas pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($\text{sig} > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Ukuran Komite Audit	0,927	1,078	Tidak ada korelasi
Komposisi Dewan Komisaris Independen	0,908	1,101	Tidak ada korelasi
Komposisi Kepemilikan Institusi	0,738	1,355	Tidak ada korelasi

Komposisi Kepemilikan Asing	0,892	1,121	Tidak ada korelasi
Komposisi Kepemilikan Publik	0,823	1,215	Tidak ada korelasi

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016.

Dari hasil uji multikolinearitas dengan menganalisis matrik korelasi antar variabel independen diperoleh $\text{tolerance} \geq 0,10$ atau sama dengan nilai $\text{VIF} \leq 10$ sehingga disimpulkan variabel independen tidak ada korelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas terhadap model regresi pada penelitian ini:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Ukuran Komite Audit	0,768	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komposisi Dewan Komisaris Independen	0,400	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komposisi Kepemilikan Institusi	0,920	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komposisi Kepemilikan Asing	0,467	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Komposisi Kepemilikan Publik	0,590	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016.

Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi:

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R2	Adjusted R2	Durbin-Watson
1	0,739	0,513	0,055519	2,235

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016

Berdasarkan hasil olah data, diketahui bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 2,235 yang berada pada daerah 1,55 – 2,46 yaitu berada pada daerah tidak ada autokorelasi. Dengan demikian dari model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi dan model regresi yang diajukan dapat diterima.

Uji Hipotesis

Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis:

1) Pengujian Hipotesis Pertama

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana (X1-Y)

Model Regresi X1	r ²	T hitung	Sig.	Koefisien Regresi	Constant
X1-Y	0,125	3,249	0,002	0,043	0,246

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Ukuran Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian maka hipotesis pertama yang menyatakan “Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, diterima.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Rouf (2011), Said dkk. (2009), yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Menurut Said dkk. (2009) tanggung jawab komite audit yang meliputi *review* departemen audit internal, mengulas rencana audit tahunan, meninjau laporan keuangan triwulan dan akhir tahun, berfokus pada perubahan kebijakan dan praktik akuntansi, penyesuaian signifikan yang timbul dari audit, asumsi kelangsungan perusahaan, kesesuaian dengan standar akuntansi dan peraturan hukum lainnya membuat pengawasan komite audit terhadap aktivitas perusahaan sangat ketat termasuk aktivitas *Corporate Social Responsibility* dan pengungkapannya. Dari penjelasan diatas maka menunjukkan bahwa komite audit dapat meminimalisir *agency problem* dan menekan *agent* (direksi) bertindak secara rasional untuk kepentingan pemegang saham. Menurut teori Agensi, *agent* harus menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perseroan (Surya dan Yustivandana, 2006:2). Keberadaan komite audit dapat mengindikasikan kualitas pengawasan yang lebih baik dan memiliki efek yang signifikan bagi manajemen dalam menyediakan lebih banyak informasi

kepada pemakai laporan keuangan (Ho dan Wong, 2001 dalam Khomsiyah, 2003). Sementara itu, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Habbash (2015) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2) Pengujian Hipotesis Kedua

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Sederhana (X2-Y)

Model Regresi X2	r ²	t hitung	Sig.	Koefisien Regresi	Constant
X2-Y	0,001	0,213	0,832	0,018	0,368

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “Komposisi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Haniffa dan Cooke (2002) yang menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan Habbash (2015) yang menyatakan bahwa komposisi dewan

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan hal ini kemungkinan disebabkan karena dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan dewan komisaris independen tidak dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab sosial (Susanti dan Riharjo, 2013). Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR seperti dikarenakan batas minimum dewan komisaris independen hanya sebesar 30%, sehingga pengaruh yang diberikan oleh dewan komisaris independen belum cukup tinggi untuk mempengaruhi keputusan dewan komisaris.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Sederhana (X3-Y)

Model Regresi X3	r ²	t hitung	Sig.	Koefisien Regresi	Constant
X3-Y	0,038	1,702	0,093	0,073	0,336

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komposisi Kepemilikan Institusi

tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “Komposisi Kepemilikan Institusi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, ditolak.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Priandita (2011) yang menyatakan bahwa komposisi kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Priandita (2011) menyatakan bahwa kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, dikarenakan institusi lebih condong untuk memaksimalkan harga saham. Indikasi pemilik institusional lebih condong ke harga saham membuat kurangnya tanggung jawab penuh sebagai pemegang saham dan hanya menjalankan tanggung jawab yang akan memaksimalkan harga saham saja. Tindakan tidak sesuai dengan teori Agensi yang menyatakan harus ada keselarasan antara pemegang saham dan manajer. Sementara itu, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Rustiarini (2011) hubungan antara kepemilikan institusional umumnya untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham sehingga otomatis pihak tersebut menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara

transparan, sehingga kepemilikan institusional dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan sukarela.

4) Pengujian Hipotesis Keempat Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Sederhana (X4-Y)

Model Regresi X4	r ²	t hitung	Sig.	Koefisien Regresi	Constant
X4-Y	0,302	5,664	0,000	0,139	0,323

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komposisi kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian maka hipotesis keempat yang menyatakan “Komposisi Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, diterima.

Hasil ini selaras dengan penelitian Haniffa dan Cooke (2005) yang menyatakan bahwa komposisi kepemilikan asing berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Menurut Haniffa dan Cooke (2005) bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility* perusahaan yang memiliki pemegang saham asing sebagai strategi proaktif untuk mendapatkan aliran lanjutan dari modal dan juga untuk menyenangkan para investor. Dari

penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemegang saham asing memberikan tekanan yang lebih kepada perusahaan untuk melakukan CSR dan mengungkapkannya sebagai strategi untuk membuat kelangsungan perusahaan tetap hidup.

Perusahaan yang terdapat kepemilikan asing cenderung mengungkapkan tanggung jawab sosial lebih luas. Hal ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, perusahaan asing terutama di Eropa dan Amerika lebih mengenal konsep praktik dan pengungkapan CSR. Kedua, perusahaan asing mendapatkan pelatihan yang lebih baik dalam bidang akuntansi dari perusahaan induk luar negeri. Ketiga, perusahaan tersebut mungkin mempunyai sistem informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan perusahaan induk. Keempat, kemungkinan permintaan yang lebih besar pada perusahaan berbasis asing dari pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum (Rosmasita, 2007 dalam Wibowo, 2013). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Machmud dan Djakman (2008) dalam Febrina (2011) menyatakan bahwa alasan adanya kepemilikan asing dalam perusahaan di Indonesia tidak meningkatkan indeks GRI sebagai ukuran pengungkapan CSR, adanya kemungkinan

jika kepemilikan asing ini dikonsolidasikan dengan perusahaan induk di negara asal mereka maka persentase kepemilikan tersebut sangat kecil, sehingga mereka menjadi kurang memperhatikan pengungkapan CSR sebagai suatu hal yang penting untuk diungkapkan ke publik.

5) Pengujian Hipotesis Kelima
Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Berganda (X5-Y)

Model Regresi X5	r ²	t hitung	Sig.	Koefisien Regresi	Constant
X5-Y	0,112	-3,055	0,003	-0,148	0,421

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komposisi kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Dengan demikian maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, ditolak.

Kemungkinan hal ini terjadi karena publik sebagai investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tidak memperhatikan tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan tersebut dan lebih mementingkan pergerakan harga saham. Hal ini terjadi dikarenakan kesadaran publik yang masih kurang terhadap CSR. Publik sebagai

investor lebih mementingkan pergerakan harga saham karena mereka ingin mendapatkan return sebesar-besarnya dari investasi yang mereka lakukan. Sehingga tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan CSR tidak mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan investasi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Rivi dan Hasan (2011) yang menyatakan bahwa rasio kepemilikan publik yang tinggi diprediksikan perusahaan akan melakukan tingkat pengungkapan social yang lebih, hal ini dikaitkan dengan tekanan dari pemegang saham, agar perusahaan lebih memperhatikan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur dan Priantinah (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham publik tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Rahma dan Indah (2010) dalam Nur dan Priantinah (2012) menyatakan bahwa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan penelitian ini adalah kemungkinan kepemilikan publik pada perusahaan di Indonesia secara umum belum memperdulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang harus secara ekstensif untuk diungkapkan dalam laporan tahunan.

6) Pengujian Hipotesis Keenam
Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Berganda (X-Y)

Variabel	Sig F	R ²	F hitung	F Tabel
Ukuran Komite Audit				
Komposisi Dewan Komisaris Independen				
Komposisi Kepemilikan Institusi	0,000	0,513	16,802	2,345
Komposisi Kepemilikan Asing				
Komposisi Kepemilikan Publik				

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2016

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit, komposisi dewan komisaris independen, komposisi kepemilikan institusi, komposisi kepemilikan asing, dan komposisi kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan CSR. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi, Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”, diterima.

Menurut Habbash (2015) komite audit yang efektif bisa menjadi alat pengawasan yang sukses untuk keputusan manajer, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial bisnis, yang akan tercermin dalam pengungkapan CSR berkualitas tinggi. Dengan penjelasan diatas maka menunjukkan bahwa komite audit dapat meminimalisir *agency*

problem dan menekan *agent* (direksi) bertindak secara rasional untuk kepentingan prinsipalnya (pemegang saham).

Keberadaan dewan komisaris independen akan menambah efektifitas pengawasan. Oleh karena itu, di Indonesia terdapat ketentuan yang mengatur tentang keberadaan dewan komisaris independen. Ketentuan yang dimaksud adalah peraturan Bursa Efek Indonesia No. 1-A tanggal 14 Juli tahun 2004. Kriteria komisaris independen dapat mendukung aktivitas perusahaan untuk berjalan lebih baik, mengontrol kecurangan di setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak (Surya dan Yustivandana, 2006:139). Dengan kata lain komisaris independen dapat mempengaruhi aktivitas CSR dan pengungkapannya karena aktivitas CSR otomatis terpantau oleh komisaris independen.

Keaktifan pemegang saham institusional dalam mengambil keputusan membuat mereka lebih *protective* dengan segala kegiatan perusahaan dengan tujuan agar keputusan yang mereka ambil lebih akurat. Kepemilikan oleh institusi dapat meningkatkan pengendalian terhadap manajemen dan mengurangi peluang tindak kecurangan yang mungkin dilakukan (Murwaningsari, 2009). Institusi secara profesional akan memantau perkembangan investasinya agar dapat menghasilkan keuntungan yang ingin mereka

capai. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Pengungkapan CSR merupakan salah satu media yang dipilih untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Pemegang saham asing berusaha mendapat legitimasi dari lingkungan sekitar dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat eksis di lingkungan sekitar. Pemegang saham asing pasti mendapat intervensi lebih dari lingkungan sekitar karena mereka bukan dari kalangan negara tempat perusahaan berada. Sebagai pihak yang concern terhadap aktivitas perusahaan berarti pemilik asing bertanggungjawab atas perusahaan dimana dia memiliki saham disana. Keahlian dalam sistem informasi dan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi mengindikasikan kepemilikan asing akan mengurangi *agency cost* yang dijelaskan dalam teori Agensi dikarenakan pemilik asing sebagai prinsipal bisa lebih bijaksana dalam menyatukan tujuannya dengan agen (manajer) dalam setiap aktivitas perusahaan.

Menurut Hadi dan Sabeni (2002), kepemilikan saham publik juga dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR. Dengan adanya kepemilikan publik, maka perusahaan harus menyajikan laporan tahunan perusahaan kepada publik untuk menjaga kepercayaan investor publik terhadap

perusahaan. Melalui laporan keuangan perusahaan para investor akan menganalisis kinerja perusahaan dan kondisi perusahaan di masa yang akan datang untuk menjadi pertimbangan dalam investasinya. Agar investor mau melakukan investasi pada perusahaan, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan perusahaan yang salah satu caranya adalah mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Secara parsial ukuran komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan. Semakin besar jumlah anggota komite audit maka semakin luas pengungkapan *corporate social responsibility* perusahaan. Keberadaan komite audit dapat mengindikasikan kualitas pengawasan yang lebih baik dan memiliki efek yang signifikan bagi manajemen dalam menyediakan lebih banyak pelaporan dan kualitas pelaporan perusahaan, termasuk laporan pengungkapan *corporate social responsibility*.
2. Secara parsial Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR

perusahaan. Komposisi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR perusahaan hal ini kemungkinan disebabkan karena Dewan Komisaris Independen yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia tidak dapat menjalankan peran dan fungsinya. Keberadaan dewan komisaris independen tidak dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam operasional perusahaan, termasuk dalam pelaksanaan dan pengungkapan aktivitas tanggung jawab social.

3. Secara parsial Komposisi Kepemilikan Institusi tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Saham Institusional di suatu perusahaan tidak bisa dijadikan dasar bahwa perusahaan akan mengungkapkan *Corporate Social Responsibility* secara luas dikarenakan pemegang saham institusional hanya memikirkan laba perusahaan.

4. Secara parsial komposisi kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki pihak asing di perusahaan maka mendorong perusahaan melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* lebih luas. Komposisi kepemilikan asing yang cukup besar menunjukkan akuntabilitas pemilik asing dan tanggung jawab mereka yang

sesuai dengan teori Agensi karena mereka dapat menjadi jembatan antara investor dan manajer, yang membuat timbulnya kepuasan dari pemegang saham lainnya dan juga kepuasan manajer. Dari tindakan tersebut maka akan berdampak positif terhadap aktivitas perusahaan termasuk CSR.

5. Secara parsial komposisi kepemilikan publik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR perusahaan. Kemungkinan hal ini terjadi karena publik sebagai investor yang ingin menanamkan modalnya pada perusahaan tidak memperhatikan tingkat pengungkapan CSR pada perusahaan tersebut dan lebih mementingkan pergerakan harga saham. Hal ini terjadi dikarenakan kesadaran publik yang masih kurang terhadap CSR. Publik sebagai investor lebih mementingkan pergerakan harga saham karena mereka ingin mendapatkan return sebesar-besarnya dari investasi yang mereka lakukan. Sehingga tinggi atau rendahnya tingkat pengungkapan CSR tidak mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan investasi.

Secara bersama - sama Ukuran Komite Audit, Komposisi Dewan Komisaris Independen, Komposisi Kepemilikan Institusi Komposisi Kepemilikan Asing dan Komposisi Kepemilikan Publik, berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Komite Audit

yang efektif bisa menjadi alat pengawasan yang sukses untuk keputusan manajer, terutama yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial bisnis, yang akan tercermin dalam pengungkapan CSR berkualitas tinggi. Kriteria Dewan Komisaris Independen dapat mendukung aktivitas perusahaan untuk berjalan lebih baik, mengontrol kecurangan di setiap aktivitas perusahaan dengan tujuan menciptakan keseimbangan kepentingan berbagai pihak. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pemegang saham asing berusaha mendapat legitimasi dari lingkungan sekitar dengan tujuan agar perusahaan tetap dapat eksis di lingkungan sekitar. Pemegang saham asing pasti mendapat intervensi lebih dari lingkungan sekitar karena mereka bukan dari kalangan negara tempat perusahaan berada. Sebagai pihak yang *concern* terhadap aktivitas perusahaan berarti pemilik asing bertanggungjawab atas perusahaan dimana dia memiliki saham disana. Dengan adanya kepemilikan publik, maka perusahaan harus menyajikan laporan tahunan perusahaan kepada publik untuk menjaga kepercayaan investor publik terhadap perusahaan. Agar

investor mau melakukan investasi pada perusahaan, maka perusahaan harus menampilkan keunggulan perusahaan yang salah satu caranya adalah mengungkapkan *Corporate Social Responsibility*.

1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut.

1. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan sampel yang lebih luas seperti sektor manufaktur, asuransi, perbankan dan lain-lain yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama agar diperoleh hasil yang lebih akurat.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang digunakan seperti komposisi kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. N. (2011). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI). *Skripsi S1 Universitas Diponegoro*.
- Cahaya, F. R., Porter, S. A., Brown, A. M., Isack, I., Chyi, R., dan Tan, W. (2008). Centre for Environmental Accountability. *Journal of the Asia-Pacific Centre for Environmental Accountability*, 14(1), 2–11.
- Esa, E., Anum, N., dan Ghazali, M. (2012). Corporate Social Responsibility and Corporate Governance in Malaysian Government-linked Companies, *Journal of Corporate Governance*, 12(3), 292–305.
- Febrina, D. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan Umur Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di BEI Tahun 2010-2014). *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia*.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS. Semarang: BP UNDIP.
- GRI. (2013). Global Reporting Inisiatives. Diakses pada 25 Januari 2016, dari: www.globalreporting.org.
- Habbash, M. (2015). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure : Evidence from Saudi Arabia. *Journal of Social Responsibility*, 10(9), 267–283.
- Haniffa, R. M., dan Cooke, T. E. (2005). The Impact of Culture and Governance on Corporate Social Reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430.
- Jensen, M. C., dan Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Jizi, M. I., Salama, A., Dixon, R., dan Stratling, R. (2014). Corporate

- Governance and Corporate Social Responsibility Disclosure: Evidence from the US Banking Sector. *Journal of Business Ethics*, 125(4), 601–615.
- Murwaningsari, E. (2009). Hubungan Corporate Governance, Corporate Social Responsibilities dan Corporate Financial Performance dalam Satu Continuum. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 1(1), 1-45.
- Murwaningsari, E., dan Pradhana, E. P. M. (2014). Pengaruh Market Power dan Corporate Governance terhadap Future Earnings Response Coefficient pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 15(1), 1-19.
- Nor Hadi dan Arifin Sabeni. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan di BEJ”. *Jurnal Maksi Vol.1/Agustus/2002*. PP. 90-104.
- Nur, M, dan Priantina, D. (2012). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori High Profile yang Listing di Bursa Efek Indonesia). *Journal Nominal*, 1(1), 22-34.
- Oh, Y., Yong, W., dan Chang, K. (2011). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea. *Journal of Business Ethics*, 104(6), 283–297.
- Priandita, I. A. (2011). Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Skripsi S1 Universitas Islam Indonesia*.
- Rouf, M. D. (2011). An Empirical Investigation into Corporate Voluntary Disclosure of Management’s Responsibilities in the Bangladeshi Listed Companies. *ASA University Review*, 5(1), 261-274.
- Rustiarini, W. N. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 1-24.
- Said, R., Hj Zainuddin, Y., dan Haron, H. (2009). The Relationship Between Corporate Social Responsibility Disclosure and Corporate Governance Characteristics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibility Journal*, 5(2), 212–226.
- Susanti, S., dan Riharjo, I. B. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Cosmetics and Household. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(1), 152-167.
- Sinaga, A. M. (2011). Pengaruh Elemen Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Pelaporan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Sektor Perbankan Di Indonesia. *Skripsi S1 Universitas Diponegoro*.
- Surya, I., dan Yustivandana, I. (2006). Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana.
- Susanti, S., dan Riharjo, I. B. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Cosmetics and Household. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(1), 152-167.
- Wibowo, P. R. E. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan

Corporate Social Responsibility pada
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2008-2010. *Skripsi*
S1 Universitas Muhammadiyah
Surakarta.